

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: untuk mengetahui bagaimana Kekuatan Hukum Akta Notaris Dalam Penerapan Parate Eksekusi Terhadap Hak Tanggungan Dan Parate Eksekusi Terhadap Obyek Fidusia. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normativ empiris, sumber data diperoleh dari kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, skunder, bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa Pengaturan mengenai Parate Eksekusi ini dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pihak bank selaku Kreditur dalam melakukan eksekusi objek hak tanggungan guna mendapatkan pelunasan dari piutangnya apabila Debitur cidera janji/wanprestasi.

Oleh karenanya dapat dipahami tujuan pembentukan UUHT untuk membentuk lembaga parate eksekusi, selain memberikan saran yang memang sengaja diadakan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk mendapatkan kembali pelunasan piutang nya dengan cara mudah dan murah, dengan maksud untuk menerobos formalitas hukum acara, di satu sisi tujuan pembentukan parate eksekusi secara undang-undang (*ex lege*), dengan maksud untuk memperkuat posisi dari kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama dan pihak-pihak yang mendapatkan hak dari padanya.

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Namun demikian menurut Pasal 1238 KUHPerdara masih memerlukan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi.

Kata kunci :Parate Eksekusi; Undang-undang Hak Tanggungan; Hak Tanggungan; Fidusia; Wanprestasi.

Abstract

This study aims to: to find out how the Legal Certainty of Notary Deed in the Implementation of Parate Eksekusi of Collateral Rights and Directional Execution of Fiduciary Objects. The approach method in this research is empirical normative law, the data source is obtained from the literature and the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed by means of qualitative analysis.

Based on the results of data analysis, it can be concluded that the regulation regarding this Parate Eksekusi in the Mortgage Rights Law aims to provide convenience to the bank as the creditor in executing the object of the mortgage in order to get full repayment of the debt if the debtor is in default / default.

Therefore, it can be understood that the purpose of forming the UUHT is to form an institution of Parate Eksekusi, in addition to providing advice that was deliberately made for creditors who hold the first Mortgage Rights to get their receivables back in an easy and cheap way, with a view to breaking through the formalities of procedural law, on the one hand the goal the formation of an execution parate by law (ex lege), with the aim of strengthening the position of the creditors of the first Mortgage holder and the parties who get rights from it.

Execution of fiduciary guarantees prior to the decision of the Constitutional Court, is carried out if the debtor or fiduciary makes a default or default. The debtor in a state of default or default means that the debtor is unable to fulfill the obligations as stipulated in the engagement or agreement. However, according to Article 1238 of the Civil Code, it still requires a written warning from the court (subpoena) and it can be said that the debtor is in default.

Keywords: Parate Eksekusi; Mortgage Law; Mortgage right; Fiduciary;

Negligence.